



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN

2024

**BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024-2026 Renja ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I dan II tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dan II tahun 2024.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro kedepan.

Bojonegoro, 20 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO



MUCHAMAD AAN SYAHBANA, SE,MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197405142003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 13

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD..... 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 17

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 18

3.3 Program dan Kegiatan 19

BAB IV PENUTUP 22

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro harus mendukung dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD;

- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang sinkron dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif PD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam PD dengan mengutamakan isu-isu strategis pada tahun 2024.

b. Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaanvRenja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.vReview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Berisi nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah yang mendukung tujuan dan sasaran PD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 2) Pencapaian SDGs;
 - 3) Pengentasan kemiskinan;
 - 4) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - 6) Pengembangan daerah terisolir;
 - 7) Dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap PD yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 melaksanakan 3 Program dan 13 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan diampu oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro sebagai pengganti Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Mebel
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 4. Fasilitas Lembaga Profesi ASN
 5. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
 6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 7. Pengelolaan Data Kepegawaian
- b. Mutasi Dan Promosi ASN
 1. Pengelolaan Mutasi ASN
 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 3. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengembangan Kompetensi ASN
 1. Pengelolaan Assessment Center
- d. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 4. Pembinaan Disiplin ASN

5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
4. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
5. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi dan Jabatan Fungsional
6. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
7. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan

Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro mengelola anggaran sebesar Rp. 20.681.093.149,- yang dialokasikan untuk 3 Program dan 13 Kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut terrealisasi sebesar Rp. 5.953.466.852,- atau sebesar 28,79%

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana Formulir E.81 terlampir. Dari Formulir E.81, untuk pengukuran capaian indikator tujuan dan sasaran masih belum ada karena akan dilakukan pada akhir tahun. Realisasi program serta kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan:

Meningkatkan Kinerja ASN

Indikator Tujuan:

1. Indeks Sistem Merit
2. Indek Profesionalitas ASN

2. Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian, Kinerja dan Disiplin;
2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran 1:

1. Rata-rata persentase capaian nilai dari 8 aspek sistem merit;
2. Nilai indeks Kinerja ASN yang memiliki Nilai SKP Baik;
3. Nilai indeks disiplin ASN terhadap pelanggaran disiplin.

Indikator Sasaran 2:

1. Nilai indeks pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi jabatan;
2. Nilai indeks kompetensi ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam / Tahun.

Indikator Sasaran 3:

1. Nilai SAKIP PD

Evaluasi hasil capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program

Prosentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah. Capaian kinerja sebesar 35% dari target yang ditetapkan 100%

Pada Program ini terdapat 5 kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun, nilai capaian kinerja sebesar 4 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 15 dokumen, terealisasi sebesar 26,67%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan:

Jumlah laporan keuangan yang disusun, nilai capaian kinerja sebesar 10 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 25 dokumen, terealisasi sebesar 40,00%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan:

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun, belum ada nilai capaian kinerja karena kegiatan dilaksanakan pada semester 2

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan:

Jumlah laporan administrasi umum yang disusun, nilai capaian kinerja sebesar 3 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 9 dokumen, terealisasi sebesar 33,33%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan:

Jumlah barang milik daerah yang disediakan, belum ada nilai capaian kinerja karena kegiatan dilaksanakan pada semester 2

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan:

Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan, nilai capaian kinerja sebesar 2 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 66,67%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan:

Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja sebesar 5 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 34 dokumen, terealisasi sebesar 14,71%

2. Program Kepegawaian Daerah

Indikator Program:

Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response, capaian kinerja sebesar 16% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 16,00%

a. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator Kegiatan:

Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam satu tahun, capaian kinerja sebesar 4 layanan dari target yang ditetapkan sebesar 11 layanan, terealisasi sebesar 36,36%

b. Mutasi Dan Promosi ASN

Indikator Kegiatan:

Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN, capaian kinerja sebesar 1 Kegiatan dari target yang ditetapkan sebesar 3 Kegiatan, terealisasi sebesar 33,33%

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator Kegiatan:

Jumlah aparatur yang mengikuti assessment, capaian kinerja sebesar 1 Kegiatan dari target yang ditetapkan sebesar 8 Kegiatan, terealisasi sebesar 12,50%

d. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator Kegiatan:

Jumlah aparatur yang mempunyai nilai kinerja baik, capaian kinerja baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Program:

Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar, capaian kinerja sebesar 24% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 24,00%

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

Indikator Kegiatan:

Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis; capaian kinerja sebesar 14 Kegiatan dari target yang ditetapkan sebesar 60 Kegiatan, terealisasi sebesar 23,33%

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional

Indikator Kegiatan:

Jumlah aparatur yang mengikuti sertifikasi dan diklat penjurusan serta fungsional, capaian kinerja sebesar 40 Kegiatan dari target yang ditetapkan sebesar 160 Kegiatan, terealisasi sebesar 25,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD menggunakan indikator yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana **Tabel T-C.30** terlampir.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan bagi aparatur dalam sisi kebutuhan kepegawaian. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yaitu : ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif*** , dimana dukungan BKPP dalam terciptanya tujuan pembangunan tersebut adalah menyediakan ASN yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan baik peningkatan infrastruktur dan aparat guna peningkatan perekonomian .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024 adalah masalah eksternal karena sebagian besar outcome akhir produk kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro ada pada pihak ketiga, diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (pusat dan regional), Kementerian PAN dan RB, dan Sekretariat Negara. Permasalahan dan hambatan lain adalah masalah internal yang berupa nilai individu, kultur individu, responsibilitas individu terhadap masalah, hubungan antar pribadi dan hubungan antar pribadi dengan unit pemangku kepentingan dan atau antar pemangku kepentingan.

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bojonegoro, karena semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap tercapai dengan kualifikasi sangat baik yang ditunjukkan oleh pencapaian output, outcome dan capaian indikator kinerja utama OPD.

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro untuk terus mengembangkan sistem, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja ASN untuk mencapai kualitas ASN yang baik.

Sesuai Sasaran Startegis Perangkat Daerah yaitu **Meningkatnya Kinerja ASN**, maka prioritas program tahun 2024, adalah “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.” Program dan kegiatan yang mendukung akselerasi terwujudnya reformasi birokrasi dalam tataran implementasi ASN di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang lain harus mendukung secara totalitas program prioritas ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana awal RKPD tahun 2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-OPD) Tahun 2024. Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2024. Setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka setiap SKPD wajib menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, mempunyai kewajiban mendukung kebijakan, Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 ke 2 yaitu ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif***, serta mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kinerja ASN” dengan indikator “Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN”

Strategi untuk mencapai sasaran daerah tersebut melalui peningkatan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara, peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung kelancaran dalam mewujudkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Renstra OPD, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro mengajukan 3 Program yang terdiri dari 13 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Dari usulan program dan kegiatan yang masuk dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro. Tahapan rancangan akhir SKPD sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C.31** terlampi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.

Sampai dengan tahun ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas

ini berhubungan dengan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai tugasnya yaitu :

1. Mengupayakan tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya.
2. Talent pool untuk Kader Potensial sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pengembangan karir dan penataan ASN.
3. Roadmap karir staf ke struktural dan eselon untuk mendukung kelancaran pengembangan karir ASN.
4. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan disajikan dalam **Tabel T-C 32** terlampir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single code base untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan

kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyusun RKPD Tahun 2023 sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (mapping) pada level urusan, bidang urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah. Dari hasil mapping, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas dua urusan, yaitu urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi ASN pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu jangka menengah tiga tahun yang ingin dicapai sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja ASN		Indek Sistem Merit	330	335	340
			Indeks Profesionalitas ASN	63,00	67,00	71,00
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian, Kinerja dan Disiplin	Rata-rata persentase capaian nilai dari 8 aspek sistem merit	82,97	84,47	86,84
			Nilai indeks Kinerja ASN yang memiliki Nilai SKP Baik	23,00	24,00	25,00
			Nilai indeks disiplin ASN terhadap pelanggaran disiplin	5,00	5,00	5,00
		Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Nilai indeks pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi jabatan	14,00	14,50	15,00
			Nilai indeks kompetensi ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam / Tahun	18,00	23,00	26,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82,00	83,00	84,00

3. 3 Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yang ke 2 yaitu : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif**. Dukungan terhadap good and clean governance diwujudkan dalam penyediaan pegawai yang profesional dan berkompeten dalam bentuk ASN yang berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah satunya melalui penerapan system merit sesuai UU ASN, yaitu kebijakan dan

manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya. “Merit System” sebagaimana dimaksud dalam UU ASN dilakukan melalui Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; Menerapkan prinsip fairness; Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja; Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan public; Manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Selain penerapan system merit, dalam rangka tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dibutuhkan pengembangan SDM sebagai motor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM pegawai. SDM pegawai atau SDM aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Untuk itu, sumber daya aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM aparatur.

Berdasarkan hasil mapping sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana **Tabel T-C.33** terlampir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja dan Pendanaan PD dirinci sebagaimana pada tabel SIPD terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan yang diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya.

Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuai jumlah pagu, maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun bersangkutan. Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro merencanakan 3 (Tiga) program dan dijabarkan menjadi 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan.

A. CATATAN PENTING

Dokumen Renja disusun dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan antara lain:

1. Kebutuhan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal;
2. Kegiatan lanjutan dan kegiatan penyempurnaan dari hasil evaluasi pada tahun sebelumnya.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program kegiatan di Kabupaten.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Pada akhir tahun anggaran 2024, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini disusun diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Bojonegoro, 20 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO



MUCHAMAD AAN SYAHBANA, SE.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197405142003121002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bojonegoro
Periode Pelaksanaan Triwulan 2 Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												I	II	III	IV											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17					
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18		
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	BKPP			
						KEPEGAWAIAN																	BKPP			
	Tujuan : Meningkatkan Kinerja ASN																							BKPP		
					Indeks Sistem Merit	indek	340			330														BKPP		
	Sasaran : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Kepegawaian, Kinerja dan Disiplin																							BKPP		
					Nilai indeks disiplin ASN terhadap pelanggaran disiplin	Indek	5			5																
					Rata-rata persentase capaian nilai dari 8 aspek sistem merit	%	86.84			82.97																
					Nilai indeks Kinerja ASN yang memiliki Nilai SKP Baik	Indek	25			23																
1		5 03 02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				8,236,035,346			2,443,024,410		200,965,052		278,766,317				479,731,369		19.64 %		479,731,369		5.82 %	BKPP
					Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	%	100			100			6					6		6.00 %		6		6.00 %		
		5 03 02 2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				4,888,950,167			1,408,695,700		54,979,300		223,453,346				278,432,646		19.77 %		278,432,646		5.68 %	BKPP
					Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam satu tahun	Dokumen	42			11		1		3				4		36.36 %		4		9.52 %		
		5 03 02 2.01 0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				141,069,167		44,668,100				13,541,000				13,541,000		30.31 %		13,541,000		9.60 %	BKPP	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	7			2				1				1		50.00 %		1		14.29 %		
		5 03 02 2.01 0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3,607,317,683			999,970,200		38,299,800		154,942,456				191,242,256		19.12 %		191,242,256		5.30 %	BKPP
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	7			2		1						1		50.00 %		1		14.29 %		
		5 03 02 2.01 0006		Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian				677,767,851			214,898,100		16,192,000		39,597,480				55,789,480		25.96 %		55,789,480		8.23 %	BKPP
					Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	37			12		1		2				3		25.00 %		3		8.11 %		
		5 03 02 2.01 0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				57,001,654			18,043,600		1,250,840						1,250,840		6.93 %		1,250,840		2.19 %	BKPP
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	14			4		1						1		25.00 %		1		7.14 %		
		5 03 02 2.01 0009		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				120,146,415			37,776,600		1,236,660		3,121,650				4,358,310		11.54 %		4,358,310		3.63 %	BKPP
					Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	14			4		1						1		25.00 %		1		7.14 %		
		5 03 02 2.01 0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				252,501,932			79,677,100				12,250,760				12,250,760		15.38 %		12,250,760		4.85 %	BKPP
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	7			2				1				1		50.00 %		1		14.29 %		
		5 03 02 2.01 0011		Pengelolaan Data Kepegawaian				43,145,465			13,662,000														BKPP	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1850			600																
		5 03 02 2.02		Mutasi dan Promosi ASN				1,461,701,026			465,883,300		117,519,100		40,609,800				158,328,900		33.99 %		158,328,900		10.83 %	BKPP
					Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan	22			8																
		5 03 02 2.02 0001		Pengelolaan Mutasi ASN				679,556,550			281,497,000		98,392,100		31,035,000				129,427,100		45.98 %		129,427,100		14.72 %	BKPP

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRAsampai pada Tahun2026 (Akhir PeriodeRENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.dRENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
						7	Rp.	8	9	I		II		III		IV		14		15		16		17																								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																					
1	2	3		4	5		6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	25				8		3		1						4		50.00 %		4		16.00 %																			
		5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		288,430,461				91,191,400		5,049,500		2,866,400						7,915,900		8.68 %		7,915,900		2.74 %	BKPP																		
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	10				3		1							1		33.33 %		1		10.00 %																				
		5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN		293,714,015				93,174,900		14,077,500		6,908,400						20,985,900		22.52 %		20,985,900		7.15 %	BKPP																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	7				2		1							1		50.00 %		1		14.29 %																				
		5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		1,040,836,847				334,128,900		1,499,000							1,499,000		0.45 %		1,499,000		0.14 %	BKPP																			
							Jumlah ASN yang mengikuti Asesmen	Kegiatan	102				8		1							1		12.50 %		1		0.98 %																				
		5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center		1,040,836,847				334,128,900		1,499,000							1,499,000		0.45 %		1,499,000		0.14 %	BKPP																			
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	6				1																																			
		5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		834,547,306				234,336,510		26,967,652		14,503,171					41,470,823		17.70 %		41,470,823		4.97 %	BKPP																			
							Persentase Aparatur yang mempunyai nilai kinerja baik	%	95.99				91.99																																			
		5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		254,218,672				80,167,500		22,657,200		9,128,210					31,785,410		39.65 %		31,785,410		12.50 %	BKPP																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	7				2		1							1		50.00 %		1		14.29 %																				
		5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		111,299,571				35,118,610		1,629,600		4,745,600					6,375,200		18.15 %		6,375,200		5.73 %	BKPP																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	7				2		1							1		50.00 %		1		14.29 %																				
		5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		16,712,525				5,301,600																BKPP																			
							Jumlah ASN yang Dibenikan Penghargaan	Orang	4																																							
		5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN		351,925,342				106,685,300		2,020,852		354,111					2,374,963		2.23 %		2,374,963		0.67 %	BKPP																			
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	37				12		1							1		8.33 %		1		2.70 %																				
		5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		100,391,196				7,063,500		660,000		275,250					935,250		13.24 %		935,250		0.93 %	BKPP																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	31				10		1		1					2		20.00 %		2		6.45 %																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																																																
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																																																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM																																																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																																																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																																																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																																																
							PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																							BKPP																		
							Tujuan : Meningkatkan Kinerja ASN																							BKPP																		
							Indeks Profesionalitas ASN	Indek	71				63																																			
							Sasaran : Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi ASN																							BKPP																		
							Nilai indeks kompetensi ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam / Tahun	Indek	26				18																																			
							Nilai indeks pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi jabatan	Indek	15				14																																			
2		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		14,212,487,319				5,203,324,595		815,849,800		545,424,225					1,361,274,025		26.16 %		1,361,274,025		9.58 %	BKPP																			
							Persentase ASN yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan manajerial	%	11.06				10.56																																			
		5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		3,842,595,182				1,218,871,846		16,419,250		351,415,675					369,834,925		30.34 %		369,834,925		9.62 %	BKPP																			
							Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis	%	2.75				2.5				1					1		40.00 %		1		36.36 %																				

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						7	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		14		15		16		17						
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3					4	5					6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18			
		5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						49,043,842				15,526,622		8,354,150		2,794,000				11,148,150		71.80 %		11,148,150		22.73 %	BKPP
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun					Dokumen	7					1		1					1		100 %		1		14.29 %	
		5	04	02	2.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						20,646,419				6,538,180		1,630,000		688,600				2,318,600		35.46 %		2,318,600		11.23 %	BKPP
							Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun					Dokumen	7					1		1					1		100 %		1		14.29 %	
		5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						3,740,302,321				1,188,480,602		7,950,000		345,535,775				353,485,775		29.79 %		353,485,775		9.45 %	BKPP
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					Orang	361				60		1		22				23		38.33 %		23		6.37 %	
		5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						32,602,610				10,326,442		485,100		2,397,300				2,882,400		27.91 %		2,882,400		8.84 %	BKPP
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Dokumen	4				1															
		5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						10,369,892,127				3,984,452,749		797,430,550		194,008,550				991,439,100		24.88 %		991,439,100		9.56 %	BKPP
							Persentase ASN yang telah mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					%	8.31				8.06															
		5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						488,915,546				154,908,481		998,500		43,172,500				44,171,000		28.51 %		44,171,000		9.03 %	BKPP
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun					Dokumen	4				1															
		5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						27,969,017				8,856,312		270,700		1,763,400				2,034,100		22.97 %		2,034,100		7.27 %	BKPP
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota					Orang	31				10		1						1		10.00 %		1		3.23 %	
		5	04	02	2.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						2,219,492,027				970,916,839		124,200,000		905,400				125,105,400		12.89 %		125,105,400		5.64 %	BKPP
							Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar					Laporan	31				10		1						1		10.00 %		1		3.23 %	

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d RENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I	II	III	IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18		
		5 04 02 2.02 0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				632,948,113				444,048,028		190,100,000		780,000				190,880,000		42.99 %		190,880,000		30.18 %	BKPP
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	121				40		17		1					18		45.00 %		18		14.88 %	
		5 04 02 2.02 0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				37,070,937				11,739,558				5,240,100				5,240,100		44.64 %		5,240,100		14.14 %	BKPP
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	7				3			2						2		66.67 %		2		28.57 %	
		5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6,922,596,162				2,381,029,481		481,861,350		134,937,650				616,799,000		25.90 %		616,799,000		8.91 %	BKPP
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	16				5		1							1		20.00 %		1		6.25 %	
		5 04 02 2.02 0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				40,902,325				12,956,052				7,209,500				7,209,500		55.65 %		7,209,500		17.63 %	BKPP
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	7				3				2					2		66.67 %		2		28.57 %	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																			38.21 %	26.16 %			12.00 %	9.58 %	BKPP	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPP	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM																										
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																										
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																										
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																										
						NON URUSAN																		BKPP		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		BKPP		
		Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah																							BKPP	
						Nilai SAKIP PD	Nilai	81			75															
3		X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24,210,150,343				13,034,744,144	1,395,927,909	2,628,230,149					4,024,158,058		30.87 %		4,024,158,058		16.62 %	BKPP	
						Prosentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100			100		20					20		20.00 %		20		20.00 %		
		X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57,343,147				68,125,200	8,338,500	6,740,900					15,079,400		22.13 %		15,079,400		26.30 %	BKPP	
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Dokumen	45			15		2					2		13.33 %		2		4.44 %		
		X XX 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19,664,875				6,196,600	3,150,000	3,018,000					6,168,000		99.54 %		6,168,000		31.37 %	BKPP	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7			2	1	1					2		100 %		2		28.57 %		
		X XX 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				17,257,562				5,463,300	5,188,500	35,200					5,223,700		95.61 %		5,223,700		30.27 %	BKPP	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7			2	2						2		100 %		2		28.57 %		
		X XX 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2,741,039				887,700		813,700					813,700		93.78 %		813,700		29.69 %	BKPP	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	7			2		2					2		100 %		2		28.57 %		

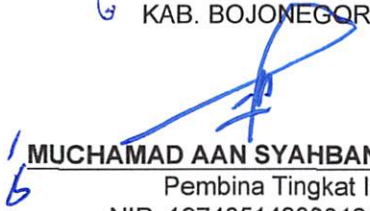
No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRAsampai pada Tahun2026 (Akhir PeriodeRENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.dRENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						7	Rp.	8	Rp.	9	10	I		II		III		14	15	16	17					
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18		
		X XX 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10,424,202				3,300,600				2,874,000				2,874,000		87.08 %		2,874,000		27.57 %	BKPP
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25				8				7				7		87.50 %		7		28.00 %		
		X XX 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,255,469				52,297,000														BKPP	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7				2																
		X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19,608,517,708				8,844,709,405	1,201,993,904	2,285,509,631				3,487,503,535		39.43 %		3,487,503,535		17.79 %	BKPP		
				Jumlah Layanan administrasi keuangan PD yang dikelola dengan baik dalam satu tahun	Laporan	75				25		3	7				10		40.00 %		10		13.33 %			
		X XX 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18,672,205,567				8,545,320,705	1,123,433,404	2,213,393,131				3,336,826,535		39.05 %		3,336,826,535		17.87 %	BKPP		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	47				47		42	43				43		91.49 %		43		91.49 %			
		X XX 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				924,822,969				295,751,600	78,084,400	71,816,500				149,900,900		50.68 %		149,900,900		16.21 %	BKPP		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	61				20		6	5				11		55.00 %		11		18.03 %			
		X XX 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2,828,081				895,300	476,100					476,100		53.18 %		476,100		16.83 %	BKPP		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	31				10		5	1				6		60.00 %		6		19.35 %			
		X XX 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4,608,908				1,522,200														BKPP	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	7				2																
		X XX 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3,852,183				1,219,600				300,000			300,000		24.60 %		300,000		7.79 %	BKPP	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	55				5			2				2		40.00 %		2		3.64 %			
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				196,230,262				62,661,500				3,750,000			3,750,000		5.98 %		3,750,000		1.91 %	BKPP	
				Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan baik dalam satu tahun	Laporan	6				2																
		X XX 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				169,563,310				54,414,600														BKPP	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55				18																
		X XX 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				26,666,952				8,246,900				3,750,000			3,750,000		45.47 %		3,750,000		14.06 %	BKPP	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	241				40																
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				847,852,128				243,892,543	30,693,900	49,461,400				80,155,300		32.87 %		80,155,300		9.45 %	BKPP		
				Jumlah layanan administrasi umum PD yang dikelola dengan baik dalam satu tahun	Dokumen	27				9		1	2				3		33.33 %		3		11.11 %			
		X XX 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				24,200,083				7,768,300				471,000			471,000		6.06 %		471,000		1.95 %	BKPP	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25				30			3				3		10.00 %		3		12.00 %			
		X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26,097,613				8,375,000	1,826,800	2,285,000				4,111,800		49.10 %		4,111,800		15.76 %	BKPP		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25				50		11	15				26		52.00 %		26		104.00 %			
		X XX 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				47,202,289				17,713,500	3,072,300	2,032,500				5,104,800		28.82 %		5,104,800		10.81 %	BKPP		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	43				350		65	40				105		30.00 %		105		244.19 %			

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRAsampai pada Tahun2026 (Akhir PeriodeRENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.dRENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trirwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
																											7	8
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18				
		X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				314,906,261				97,957,343		7,018,900		13,558,100				20,575,000		21.00 %		20,575,000		6.53 %	BKPP		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25				550		45		80				125			22.73 %		125		500.00 %				
		X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				159,589,554				21,225,300				6,060,000				6,060,000		28.55 %		6,060,000		3.80 %	BKPP		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	19				50				15				15			30.00 %		15		78.95 %				
		X XX 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10,119,192				3,246,000		645,000		430,000				1,075,000		33.12 %		1,075,000		10.62 %	BKPP		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	73				24		5		4				9			37.50 %		9		12.33 %				
		X XX 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material				3,515,174				1,127,400				487,500				487,500		43.24 %		487,500		13.87 %	BKPP		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10				60				26				26			43.33 %		26		260.00 %				
		X XX 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				4,495,054				1,385,100															BKPP		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7				4																			
		X XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				257,726,908				85,094,600		18,130,900		24,139,300				42,270,200		49.67 %		42,270,200		16.40 %	BKPP		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	151				50		11						11			22.00 %		11		7.28 %				
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36,287,438				1,728,150,300															BKPP		
			Jumlah layanan administrasi umum PD yang dikelola dengan baik dalam satu tahun	Unit	6				2																			
		X XX 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36,287,438				1,728,150,300															BKPP		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6				2				1				1			50.00 %		1		16.67 %				
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,715,186,695				1,544,501,796		133,470,705		216,165,118				349,635,823		22.64 %		349,635,823		12.88 %	BKPP		
			Jumlah layanan administrasi umum PD yang dikelola dengan baik dalam satu tahun	jenis	108				3		1						1			33.33 %		1		0.93 %				
		X XX 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,820,896				1,868,400		200,000						200,000		10.70 %		200,000		3.44 %	BKPP		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36				12		2		4				6			50.00 %		6		16.67 %				
		X XX 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,447,533,843				854,756,300		91,401,833		117,365,118				208,766,951		24.42 %		208,766,951		14.42 %	BKPP		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36				12		2		4				6			50.00 %		6		16.67 %				
		X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,261,831,956				687,877,096		41,868,872		98,800,000				140,668,872		20.45 %		140,668,872		11.15 %	BKPP		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36				12		1		3				4			33.33 %		4		11.11 %				
		X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				748,732,965				542,703,400		21,430,900		66,603,100				88,034,000		16.22 %		88,034,000		11.76 %	BKPP		
			Jumlah BMD yang dipelihara dengan baik dalam satu tahun	Unit	111				34		1		4				5			14.71 %		5		4.50 %				
		X XX 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				358,664,761				122,178,800		16,210,900		59,903,100				76,114,000		62.30 %		76,114,000		21.22 %	BKPP		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31				10		2		5				7			70.00 %		7		22.58 %				
		X XX 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel				17,423,881				5,551,300				5,200,000				5,200,000		93.67 %		5,200,000		29.84 %	BKPP		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10				3				3				3			100 %		3		30.00 %				
		X XX 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59,527,267				46,956,300		5,220,000		1,500,000				6,720,000		14.31 %		6,720,000		11.29 %	BKPP		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	61				20		3		7				10			50.00 %		10		16.39 %				
		X XX 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				313,117,056				368,017,000															BKPP		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4				1																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																				39.43 %	30.87 %					45.26 %	16.62 %	BKPP

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRA sampai pada Tahun2026 (Akhir PeriodeRENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.dRENJA Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I	II	III	IV									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPP	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM																								
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																								
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD PD TAHUN BERIKUTNYA																								
JUMLAH TOTAL						46,658,673,008	0	20,881,093,149	2,412,742,761	3,453,045,691	0	0	5,865,788,452			5,865,788,452								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		35.28 %	28.36 %		21.65 %	12.57 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Disusun
Bojonegoro, 05 July 2024

KEPALA BKPP
KAB. BOJONEGORO


MUCHAMAD AAN SYAHBANA, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197405142003121002

No	Tujuan / Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target RENSTRAsampai pada Tahun2026 (Akhir PeriodeRENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.dRENJA Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENSTRA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA Tahun 2024 (%)		Perangkat Dserah Penanggung Jawab	
											I	II	III	IV									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	18	
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPP	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM																							
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM																							
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA																							
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPd PD TAHUN BERIKUTNYA																							
JUMLAH TOTAL						46,658,673,008	0	20,681,093,149	2,412,742,761	3,453,045,691	0	0	5,865,788,452			5,865,788,452							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																35.28 %	28.36 %			21.65 %	12.57 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Disusun
Bojonegoro, 05 July 2024



KEPALA BKPP
KAB. BOJONEGORO

MUCHAMAD AAN SYAHBANA, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197405142003121002

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPP	Prosentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.896.391.414	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPP	Prosentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	11.688.393.053	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	15 Dokumen	18.125.402	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	15 Dokumen	91.748.700	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.196.769	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	11.642.600	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Kali	5.463.596	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Kali	10.828.300	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Kali	867.797	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Kali	5.792.700	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Kali	3.300.221	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Kali	7.224.600	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.297.019	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	56.260.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah laporan keuangan yang disusun	25 Laporan	6.431.023.170	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah laporan keuangan yang disusun	25 Laporan	7.233.372.454	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang	6.131.634.138	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang	6.892.487.754	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Laporan	295.751.626	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Laporan	337.247.600	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kali	895.354	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Kali	895.300	
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKPP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Laporan	1.522.473	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKPP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Laporan	1.522.200	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Kali	1.219.579	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Kali	1.219.600	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 Laporan	62.662.040	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 Laporan	209.444.000	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	54.414.856	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	201.197.100	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Kali	8.247.184	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Kali	8.246.900	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	9 Laporan	267.690.244	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	9 Laporan	467.364.128	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Buah	7.767.780	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Buah	7.768.300	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Buah	8.376.852	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Buah	16.073.600	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	350 Buah	15.151.063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	350 Buah	29.622.900	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	550 Buah	97.814.580	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	550 Buah	119.513.128	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Buah	51.225.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Buah	21.225.300	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Buah	3.246.241	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Buah	3.246.000	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	BKPP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 Buah	1.128.306	Penyediaan Bahan/Material	BKPP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 Buah	5.725.800	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Kali	1.385.263	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Kali	1.385.100	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	81.594.859	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	262.804.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Unit	12.091.001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Unit	1.692.580.500	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.091.001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.692.580.500	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 Jenis	871.522.194	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 Jenis	1.354.223.671	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.868.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.008.400	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	464.631.636	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	784.376.975	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	405.022.158	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	567.838.296	
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	34 Unit	233.277.363	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	34 Unit	639.659.600	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	115.124.061	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	194.785.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BKPP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	5.592.744	Pemeliharaan Mebel	BKPP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	6.151.300	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.106.412	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	70.706.300	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93.454.146	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	368.017.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP	Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	100 %	2.622.728.156	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP	Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	100 %	2.136.542.550	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam satu tahun	11 Layanan	1.558.697.163	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam satu tahun	11 Layanan	1.012.873.140	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	44.668.106	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	44.668.100	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPP	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Kali	1.149.970.493	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPP	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Kali	593.803.200	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Kali	214.898.389	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Kali	230.023.100	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPP	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Kali	18.043.872	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPP	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Kali	51.281.440	
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	4 Laporan	37.776.681	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	4 Laporan	31.496.600	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Paket	79.677.263	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Paket	47.938.700	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	600 Dokumen	13.662.359	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	600 Dokumen	13.662.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN	3 Kegiatan	465.913.834	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN	3 Kegiatan	550.713.900	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	8 Kegiatan	281.547.115	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	8 Kegiatan	349.687.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Kegiatan	91.191.791	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Kegiatan	114.302.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Kegiatan	93.174.928	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Kegiatan	86.724.900	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP	Jumlah aparatur yang mengikuti assessment	8 Orang	333.779.280	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP	Jumlah aparatur yang mengikuti assessment	8 Orang	356.473.900	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	BKPP	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Kegiatan	333.779.280	Pengelolaan Assessment Center	BKPP	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Kegiatan	356.473.900	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Jumlah aparatur yang mempunyai nilai kinerja baik	8500 Orang	264.337.879	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Jumlah aparatur yang mempunyai nilai kinerja baik	8500 Orang	216.481.610	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	80.167.639	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	111.700.600	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	35.118.917	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	35.118.610	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPP	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1 Dokumen	5.301.951	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPP	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1 Dokumen	507.600	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Kegiatan	111.685.610	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Kegiatan	66.155.300	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Kasus	32.063.762	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Kasus	2.999.500	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPP	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 %	4.517.560.413	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPP	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 %	5.203.324.595	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPP	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	60 Orang	1.218.872.604	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPP	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	60 Orang	992.808.146	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	15.526.999	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	15.526.622	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	6.538.200	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	6.538.180	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	1.186.480.604	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	960.416.902	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	10.326.801	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	10.326.442	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPP	Jumlah aparatur yang mengikuti sertifikasi dan diklat penjurangan serta fungsional	160 Orang	3.298.687.809	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPP	Jumlah aparatur yang mengikuti sertifikasi dan diklat penjurangan serta fungsional	160 Orang	4.210.516.449	
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	BKPP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	154.908.756	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	BKPP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	140.731.136	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKPP	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	8.856.490	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKPP	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	8.856.312	
5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	BKPP	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	10 Orang	711.716.891	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	BKPP	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	10 Orang	859.847.961	
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	BKPP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	40 Orang	202.096.266	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	BKPP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	40 Orang	517.598.026	
5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi dan Jabatan Fungsional	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	3 Dokumen	11.739.776	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi dan Jabatan Fungsional	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	3 Dokumen	11.739.558	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	120 Orang	2.196.413.369	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	120 Orang	2.658.787.404	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	3 Laporan	12.956.261	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	3 Laporan	12.956.052	
					15.036.679.983					19.028.260.198	

Bojonegoro, 31 Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO


MUCHAMAD AAN SYAHBANA, SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740514 200312 1 002